Implementasi Program Bumdes Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Distrik Klamono Kabupaten Sorong

Ana Lestari[1], Ummu Salmah[2], Yohana Tayukbin[3]
[123]Universitas Muhammadiyah Sorong
Email: alannalesri034@gmail.com

Article History:
Received: 20 Maret 2025
Revised: 20 April 2025
Accepted: 24 April 2025

Kata Kunci: *Implementasi, Program, Kesejahteraan*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya mewujudkan desa mandiri di distrik klamono kabupaten sorong dan apa saja hambatan yang menjadi kendala dalam proses implementasi nya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang diolah dengan Teknik analisis data untuk mendapatkan pemahamam tentang implementasi program BUMDes pada Distrik Klamono. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program BUMDes pada Distrik Klamono secara umum pelaksanaan programnya sudah berjalan dengan baik, terutama pada Kampung Klamono dilihat dari masih tetap berjalannya program BUMDes seperti program yang di buat yaitu sistem sewa barang kepada masyarakat ketika mereka membuat suatu acara, dapat melakukan penyewaan barang yang mereka butuhkan baik itu tenda jadi ,kursi plastik dan makanan prasmanan, serta program usaha simpan pinjam yang ditujukan kepada UMKM. Program ini dapat dikatakan berhasil karena program tersebut masih tetap berjalan hingga saat ini dan dianggap sangat membantu mengsejahterakan masyarakat di kampung klamono distrik klamono kabupaten sorong. Namun berbeda dengan yang terjadi pada kampung klawana dan kampung wonosari yang dimana programnya hanya dapat berjalan beberapa waktu saja karena macet dan dirasa tidak dapat mensejahterahkan Masyarakat kampung tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini BUMDes memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkan desa mandiri. Namun, keberhasilan implementasi BUMDes sangat tergantung pada berbagai faktor, seperti perencanaan yang matang, penguatan sumber daya manusia, dukungan pemerintah, dan inovasi yang terus-menerus. Dengan strategi yang tepat, BUMDes dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.*

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelolah asset ekonomi sterategis didesa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam Undang-Undang N0.6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelolah badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes merupakan suatu cara untuk memanfaatkan undang-undang untuk diberikan kewenangan kepada pemerintah desa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian desa dan juga kesejahteraan untuk seluruh masyarakat desa (Saniyah 2019). Keberhasilan dari sebuah pembangunan dalam sebuah masyarakat tidak selalu ditentukan oleh sumber dana keuangan dan manajemen keuangan namun dipengaruhi oleh respon serta peran dari masyarakat. usaha di pedesaan, sehingga mereka masih memerlukan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Landasan dasar bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat maupun daerah. BUMDes menjadi pilar kegiatan perekonomian di desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes dikatakan sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosia yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal yang dimiliki baik berupa barang maupun jasa. BUMDes merupakan progam BPM-BANGDes untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi kerakyatan. Dengan demikian komitmen pemerintah dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakat pedesaan ini, harus didukung oleh masyarakat.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai juga dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan menjaga keberlanjutan usaha masyarakat desa dari adanya ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat bahwa badan usaha milik Desa merupakan lembaga perekonomian baru yang beroperasi atau menjalankan usaha di pedesaan, sehingga mereka masih memerlukan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Landasan dasar bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat maupun daerah. BUMDes menjadi pilar kegiatan perekonomian di desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes dikatakan sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosia yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal yang dimiliki baik berupa barang maupun jasa. BUMDes merupakan progam BPM-BANGDes untuk mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi kerakyatan. Dengan demikian komitmen pemerintah dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakat pedesaan ini, harus didukung oleh masyarakat.

Peran BUMDes bagi desa yang menjalaninya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan

ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi (Dewi, 2014:4).

BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dibentuknya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa adalah salah satu bentuk peran pemerintah sebagai kekuatan untuk membantu terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan produktivitas ekonomi bagi desa. BUMDes yang diatur dengan Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2010 diyakini mempunyai fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan preferensi masyarakat perdesaan. Sebagai aset yang dikelola oleh desa, BUMDes sudah pasti berupaya memajukan usaha-usaha perdesaan,dengan harapan BUMDes akan lebih mudah berfungsi sebagai lembaga pembiayaan usaha perdesaan. (*Moh. Mahfud, MD.,2012:334*).

Tujuan pembentukan BUMDes untuk:

1) menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
2) meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
3) memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan.
4) mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa.
5) mendorong berkembangnya usaha saektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
6) meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
7) menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian desa dan pemerataan pendapatan.

.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan bentuk data berupa kalimat atau narasi yang diperoleh melalui teknik penggumpulan data. Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan cendrung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditampilkan, Penelitian ini menggunakan teknik observasi yang dimana peneliti telah ikut secara langsung dan mengamati aktivitas yang dilakukan oleh BUMDes Distrik Klamono.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan program BUMDes sendiri dibuat sebagai motor penggerak ekonomi desa, agar pengelolaan keuangan desa dapat terorganisir dengan baik. Seperti yang dinyatakan oleh Bpk. Joni Momot sebagai Kepala Kampung Klamono pada Distrik Klamono Kabupaten Sorong beliau berkata bahwa :

"Begini yaa.. Ade.. ! Tujuan secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan di kampung dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan pendapatan asli Desa, selain itu juga dapat meningkatkan potensi berkembangnya kampung ini dan meminimalisir pengangguran karena menciptakan kesempatan kerja kepada Masyarakat untuk membuka usaha baru". (Wawancara tanggal 20 September 2024)

Hal senada juga di sampaikan oleh Bpk. Stepanus Mamringgofok selaku Kepala Kampung Klawana, beliau mengatakan bahwa:
"Tujuan Ada Nya Program Bumdes Ini Yaitu Untuk Memberikan Kesempatan *Kepada Masyarakat Di Kampung Membuka Usaha Dengan Mempertimbangkan Kebutuhan Masyarakat Di Kampung Klawana" (Wawancara Tanggal 20 September 2024)*

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa tujuan utama adanya program BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Distrik Klamono dengan memanfaatkan potensi alam yang ada dilingkungan Distrik Klamono. Implementasi dari suatu kebijakan merupakan langkah awal untuk melakukan suatu perubahan. Implementasi adalah proses penerapan suatu rencana atau gagasan menjadi tindakan nyata. Sederhananya, ini adalah langkah yang diambil untuk mengubah teori menjadi praktik. Baik itu dalam skala kecil atau dalam skala besar seperti meluncurkan program pemerintah salah satunya yaitu program BUMDes pada Distrik Klamono Kabupaten Sorong, prinsip dasar implementasi yang ada pada program BUMDes tetap sama. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan desa mandiri khususnya pada Distrik Klamono.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara partisipatif, transparansi, kooperatif, dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan upaya yang serius untuk memastikan pengelolaan program BUMDes tersebut berjalan dengan efektif, efisien, proporsional dan mandiri. Pemenuhan kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pemberian pelayanan distribusi barang dan/atau jasa yang akan dikelola mandiri oleh Masyarakat didampingi pemerintah desa, menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dari BUMDes. Sebagai entitas bisnis yang dimiliki oleh desa, BUMDes memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemenuhan kebutuhan tersebut diupayakan tidak memberatkan masyarakat. BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan termasuk pada Distrik Klamono yang didalam nya terdiri dari beberapa kampung – kampung yang memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda – beda. BUMDes juga memiliki mekanisme atau tata aturan yang harus disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan kerugian dari pihak Masyarakat maupun pemerintah desa. Program BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda – beda, seperti unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Secara umum unit yang ada pada struktur organisasi BUMDes dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu; unit jasa keuangan dan unit usaha sektor ekonomi..

1. Unit jasa keuangan contohnya menjalankan usaha simpan pinjam. Hal ini sejalan dengan program yang ada pada Kampung Klamono yang di programkan pada tahun 2016 dan di jalankan pada tahun 2017 sampai saat ini. Kepala Pengurus BUMDes Klamono oleh Ibu Salomina Yadantrar berdasarkan wawancara dengan beliau mengatakan bahwa,

"Program BUMDes yang dibuat pada kampung klamono yaitu salah satunya program simpan pinjam, program ini ditujukan untuk para UMKM dalam mengembangkan setiap usahanya dan ketika sudah berjalan akan di kembalikan lagi modal ke kas BUMDes dan terus dapat melanjutkan usahanya" (Wawancara Tanggal 20 September 2024

Dari wawancara diatas bersama pengurus langsung dari BUMDes kampung Klamono pada Distrik Klamono dapat kita ketahui bahwa jenis program BUMDes dari sektor usaha jasa keuangan dibuat dengan tujuan dapat meningkatkan semangat para UMKM agar mau dan ingin mengembangkan usaha nya dengan perantaraan permodalaan dari program BUMDes simpan pinjam tersebut.

2. Unit usaha sektor ekonomi contohnya yaitu menjalankan usaha pertokoan, industri rumahan, fotocopy, pertanian, perkebunan, atau perikanan menyesuaikan potensi yang ada pada desa tersebut. Contoh implementasi dari unit usaha sektor ekonomi yaitu, program yang dijalankan pada Kampung Klawana di programkan pada tahun 2016 dan dijalankan pada tahun 2017 yaitu usaha tempat fotocopy dan tempat penjualan ATK.

Adapun pernyataan wawancara dari Bpk. Alan Dance A. Sesa selaku Kepala Pengurus Bumdes Klawana terkait program tersebut yaitu;
"Kampung kami merancang program penyediaan tempat penjualan ATK dan usaha tempat fotocopy dikarenakan selama ini hal tersebut sangat sukar ditemukan pada kampung klawana" (Wawancara Tanggal 20 September 2024)

Hal senada juga di sampaikan oleh Bpk. Yoel Momot selaku RT. Kampung Klawana, beliau mengatakan bahwa:
"benar dikampung ini toko penjual barang ATK masih minim jadi Masyarakat yang membutuhkan peralatan ATK harus mencarinya ke daerah lain dulu" (Wawancara Tanggal 20 September 2024)
Sedangkan kampung wonosari dalam sektor usaha unit ekonomi menurut Bpk. Agus Roni Kepala Kampung Wonosari;
"program yang ada dikampung kami yaitu Penjualan BBM (Minyak Tanah) yang berjalan pada tahun 2018 namun berhenti/tutup pada tahun 2020/ karena sumberdaya pemasok utama minyak tanah yang susah diakses dari segi transportasi dan belum mempunyai agen sendiri mengakibatkan program ini harus ditutup " (Wawancara Tanggal 20 September 2024)

Dapat di simpulkan dari wawancara diatas bahwa program-program BUMDes pada sektor unit usaha jasa keuangan dan sektor unit usaha ekonomi ada yang berjalan lancer sehingga masih dijalankan sampai saat ini, namun ada juga yang macet bahkan harus ditutup karena dianggap sudah tidak dapat berkontribusi dalam mensejahterahkan kehidupan Masyarakat pada Distrik Klamono Kabupaten Sorong.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Program BUMDes dalam mewujudkan Desa mandiri di Distrik Klamono secara umum pelaksanaan programnya sudah berjalan dengan baik, dilihat dari masih tetap berjalannya beberapa program utama BUMDes yang ada di Distrik Klamono. Seperti program yang di buat yaitu system sewa barang kepada masyarakat ketika

mereka membuat suatu acara, dapat melakukan penyewaan barang yang mereka butuhkan baik itu tenda jadi ,kursi plastik dan makanan prasmanan. Namun tidak dipungkiri ada hal – hal yang masih perlu diperbaiki untuk kelancaran berjalannya suatu program BUMDes,

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbani Rukmianto, 2012, Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Astuti, Lusi, 2014, Prinsip Pembangunan Desa, Jakarta: Rajawali Pers.

Asbeni, 2020, Strategi Pengembangan Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri, Jurnal PATANI Vol 4, No 2, h 39-45, September 2020

Debbie Yuari Siallagan,Heri Yanto, M.Awaluddin,Vol 4, No. 1 ,2022. Implementasi Program Desa Mandiri di Desa Sebunga,Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Dewi, Amelia Sri Kusuma, 2014, Peranan BUMDes sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menumbuhkan perekonomian desa, Jurnal Penelitian Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro, Semarang

Kartasasmita, Ginanjar, 2012 Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang berakar pada masyarakat, Jakarta: Bappenas.

Kurniawan, Borni, 2015, Desa Mandiri Desa Membangun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.

Kusuma, Hanny dan Nurul Purnamasari, 2016, Membangun Gerakan Desa Wirausaha, Yogyakarta: Penabulu Foundation.

Kuncoro, Mudrajad, 2010, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta: Erlangga.

Moleong, Lexy J., 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Suharcto, Edi, 2011, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama.

Sukasmanto. 2014. Rancang Bangun Bisnis Pengelolaan BUMDes. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Vindyandika, 2011, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jakarta: Rineka Cipta.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2010, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elek Media Komputindo.

Widjaja, HAW., 2013. Pemerintahan Desa, Jakarta: Raja Grafindo Persada.